

Jurnal Ilmiah

KOSMOPOLITAN

Volume 1 No. 1, Januari – April 2013

ISSN 2337-6872

Hubungan Internasional dalam Dunia yang Terus Berubah

Negara, Etika dan Pembangunan

Arief Wicaksono (Universitas 45, Makassar)

Signifikansi Etika dalam Proses Pembangunan Global

Sonny Sudiar (Universitas Mulawarman, Samarinda)

**Ancaman terhadap Keamanan Nasional
di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Endriady Edy Abidin (Universitas Fajar, Makassar)

**Perangkap Pembangunan Ekonomi Berbasis Neoliberalisme
dan Ironi Kemiskinan di Indonesia**

Angga Nurdin Rachmad (Universitas Jenderal Achmad Yani, Bandung)

**Penyelesaian Konflik Dagang Uni Eropa – Amerika Serikat
melalui Mekanisme WTO**

Yuniarti (Universitas Mulawarman, Samarinda)

Demokrasi dan Amerika Serikat

Muhammad Nasir Badu (Universitas Hasanuddin, Makassar)

Jurnal Ilmiah Kosmopolitan

Volume 1 No. 1, Januari – April 2013

**HUBUNGAN INTERNASIONAL
DALAM DUNIA YANG TERUS BERUBAH**



ARIEF WICAKSONO, MA
28/03/2013



Jurnal Ilmiah Kosmopolitan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Fajar

Volume 1 No. 1, Januari - April 2013

ISSN: 2337-6872

Pelindung

Rektor Universitas Fajar

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.

Editor Ahli

Drs. Aspiannor Masrie

Pemimpin Redaksi

Endriady E. Abidin, S.IP, MA

Staf Redaksi

Achmad, S.IP

Syamsul Asri, S.IP, M.Fil.I

Layouter

Ridwan Mappa, S.IP

Diterbitkan oleh

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar



Jl. Abdurrahman Basalamah (Ex. Jl. Racing Center) No. 101, Makassar, Sulawesi Selatan 90231.

Telp : (0411) 447508-459064

Fax : (0411) 459065

E-mail: jik-unifa@gmail.com

Daftar Isi

Pengantar Redaksi ~ v

Negara, Etika dan Pembangunan ~ 1

Arief Wicaksono

Signifikansi Etika dalam Proses Pembangunan Global ~ 9

Sonny Sudiar

**Ancaman terhadap Keamanan Nasional
di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi ~ 19**

Endriady Edy Abidin

**Perangkap Pembangunan Ekonomi Berbasis
Neoliberalisme dan Ironi Kemiskinan di Indonesia ~ 29**

Angga Nurdin Rachmad

**Penyelesaian Konflik Dagang
Uni Eropa - Amerika Serikat melalui Mekanisme WTO ~ 41**

Yuniarti

Demokrasi dan Amerika Serikat ~ 65

Muhammad Nasir Badu

Kontributor ~ 89

Pengantar Redaksi

Rasa syukur yang tak terkira terpanjatkan untuk Sang Pemilik Semesta Raya atas terbitnya Volume I jurnal ini. Segala kerja keras yang telah dikeluarkan oleh staf redaksi dan pihak yang telah memberikan bantuan, langsung dan tidak langsung, patut mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga dengan terbitnya jurnal ini jerih payah mereka dapat terbayarkan, dan sekaligus menjadi sumbangsih nyata mereka, yang tak terkira, bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia Timur dan negeri ini.

Sesuai dengan tema nomor ini: Hubungan Internasional dalam dunia yang berubah, kami berusaha menyuguhkan beberapa artikel yang hendak menyemarakkan wacana dalam studi Hubungan Internasional di Indonesia timur, khususnya, dan Indonesia, umumnya. Dengan tema utama "dunia semakin berubah", secara sederhana, kami hendak memperlihatkan kepada sidang pembaca tentang pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam studi Hubungan Internasional. Dunia HI telah banyak berubah semenjak pertama kali diinstitusikan di Universitas Aberyswith pada tahun 1919. Perspektif Realis yang menjadi pemuncak dalam studi HI sejak Pasca PD II, bahkan hingga saat ini, sedang mendapat gempuran bertubi-tubi dari berbagai perspektif lain. Cara pandang yang *state-centric* dan dikotomi *high* dan *low politics* sedikit demi sedikit meleleh dengan munculnya berbagai aktor non-negara dan semakin mencuatnya berbagai isu-isu *low politics* yang kini juga menjadi *concern* penting dalam HI.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, maka ilmuwan-ilmuwan HI senantiasa dituntut agar mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mampu menjadi seorang intelektual organik yang mampu menjembatani antara dunia akademis dan realitas yang ada di luar. Tidak hanya sekedar menjadi intelektual menara gading yang hanya berdiam dalam ruang hampa. Semoga spirit tersebut tercermin dalam jurnal ini.

Artikel-artikel dalam jurnal ini ditulis oleh para akademisi Hubungan Internasional dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Semoga apa yang menjadi isi dari jurnal ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia Timur, khususnya, dan Indonesia, umumnya, sehingga wacana-wacana dalam studi HI di Indonesia semakin bervariasi dan berkembang. Selamat Membaca.

Makassar, 5 Maret 2013

Redaksi

NEGARA, ETIKA DAN PEMBANGUNAN

Arief Wicaksono

Abstract:

In the process of development, the role of state is significant based on some factors. Firstly, state intervention is needed because many of her citizens still live below the poverty line. Secondly, individual actors in market do not guarantee the income distribution level. National income distribution in developing countries is unequal and the disparity of income between the haves and the have nots is very wide. Thirdly, the role of state would guarantee the economic growth in collaboration with market. However, strong intervention of state in development in developing countries is unclear. Instead of creating welfare for her people, the dominant role of state causes the lost of ethics in development. Furthermore, the neglection of ethics in development would be contradictive with sustainable development delivered in many international development fora.

Keywords:

state, ethics, development, sustainable development

Pembangunan adalah hak dari setiap bangsa untuk memperbaiki kondisinya atau membangun dirinya dalam kerangka *nation-building*, dan dalam konteks yang seperti itu, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kapasitas sebuah bangsa, oleh karena itu, untuk menjaga agar kapasitas ini tetap ada, maka diperlukan peningkatan peran negara. Peningkatan peran negara dalam pembangunan memiliki dimensi yang berbeda diantara negara maju dan berkembang, di negara maju setidaknya peran negara memiliki intervensi yang sangat sedikit hanya terbatas pada fungsi regulator pembangunan, pembangunan lebih banyak di jalankan oleh pihak swasta, namun berbanding terbalik dalam konteks negara berkembang, peran negara memiliki intervensi yang cukup kuat dalam pembangunan, hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor; *Pertama*, intervensi negara dibutuhkan karena sebagian besar negara masih hidup dibawah garis kemiskinan, *Kedua*, karena kinerja individu dalam mekanisme pasar

tidak menjamin tingkat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional di Negara berkembang tidak merata, kesenjangan pendapatan golongan kaya dan miskin sangat lebar. *Ketiga*, peran negara dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dengan mengkombinasikan antara peran negara dan pasar dalam pembangunan (Winarno, 2009).

Peran negara seperti yang disyaratkan Winarno memiliki keterkaitan yang erat dengan aras ekonomi politik. Strategi penguatan peran negara yang seperti ini kemudian disebut sebagai nasionalisme (Gilpin, 2001). Nasionalisme dipandang sebagai sebuah model pembangunan yang dapat memberikan jaminan keberhasilan, seperti yang terlihat dari pembangunan negara-negara di Asia Timur. Peran negara dalam pembangunan kemudian menjadi sangat penting, karena, pertama dalam pengadaan dan pengaturan pemanfaatan barang-barang publik. Kedua, sebagai penjamin terselenggarakannya pembangunan sesuai dengan visi dan visi bangsa. Ketiga, untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara perusahaan yang besar dengan perusahaan kecil serta menengah.

Pada dasarnya penguatan negara yang dimaksudkan sebagai nasionalisme menjadi sangat efektif ketika negara dalam posisi aktor sentral untuk memberikan control yang kuat terhadap pasar yang sangat rentan terhadap krisis, namun ada syarat-syarat yang seharusnya dibawa dalam pengertian nasionalisme diantaranya adalah, kebijakan yang terpusat (sentralisasi pembangunan). Pada beberapa negara, pembangunan yang tersentralisasi mampu untuk mengaktualisasikan pembangunan lebih cepat dan terarah dan lebih efisien dalam hal anggaran/dana pembangunan. Selain itu juga merubah pandangan dari *government* menjadi *governance* Dari pembuat kebijakan tunggal menjadi pembuat kebijakan yang bekerjasama dengan aktor-aktor non-pemerintah. Munculnya negara-negara di Asia Timur dengan kemajuan yang mengagumkan membuktikan bahwa peran pemerintah yang terpadu dengan pihak swasta sangat efektif dalam pembangunan. Nasionalisme setidaknya memberikan jalan tengah terhadap model pembangunan khususnya di negara berkembang dalam menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan demokrasi.

Teoritisi demokrasi deliberatif, seperti John Dryzek sangat tidak sepakat dengan demokrasi kosmopolitan David Held. Menurut Dryzek, menciptakan sebuah struktur global yang baru dengan upaya re-definisi, belum tentu akan memajukan demokrasi. Dryzek beragumen bahwa, demokrasi tidak mesti dikaitkan dengan konsep *government* sebagai perwujudan aturan formal, tapi lebih sesuai jika dipakai konsep *governance*

ber-elaborasi dengan pengusaha dalam mengelola aktivitas-aktivitas pembangunan, yang misalnya dalam konteks Indonesia, bertumpu pada bantuan luar negeri. Oleh karena pemahaman konseptual yang samar terhadap pembangunan, maka para elit politik dan pengusaha dapat dengan mudah mengkombinasikan kewenangan dan kesenangan untuk mewujudkan kepentingannya. Pada konteks ini, pembangunan harusnya melihat kembali etika sebagai sebuah intervensi dalam proses-proses menuju kemajuan yang didasarkan pada nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi dalam sebuah lingkup masyarakat tertentu; dengan kata lain, etika dapat menjadi sebuah alternatif bagi pembangunan, agar bisa dimengerti dalam aktivitas kultural yang lebih berorientasi pada masyarakat banyak.

Membicarakan pembangunan sebagai warna yang utama dalam upaya untuk membuat kemajuan dan menjadi lebih baik, itu berarti membicarakan *progress*, yang membuat pembangunan kemudian mendapatkan nilai-nilai (*values*) tertentu dalam setiap tahapannya. Nilai-nilai itu bersumber dari bagaimana kemajuan itu direncanakan, didesain, dan diproduksi, sehingga tentunya melibatkan sistematika, mekanisme, strategi, dan juga taktik, agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan pastinya juga dapat diukur. Upaya seperti itu kerap kali dipahami sebagai saintifikasi pembangunan, dimana hal tersebut biasanya berpijak pada kriteria-kriteria ekonomi (yang diyakini) juga bersifat saintifik dan universal (Hiariej 2005:4). Oleh karena itu, pembangunan yang bersandar pada proses saintifikasi kriteria-kriteria ekonomi, dapat lebih dipahami sebagai pembangunan ekonomi.

Pembangunan dengan pertumbuhan ekonominya, disatu sisi, berhasil membuat banyak negara barat menjadi lebih sejahtera dan lebih maju pasca Perang Dunia II. Kesadaran untuk terlepas dari belenggu perang, mendominasi setiap aktivitas para *policy makers* di negara barat agar perang serupa tidak terjadi lagi, dan kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan, sangat antisipatif terhadap munculnya dinamika dan gejolak sosial-politik, yang oleh Rostow, dikatakan sebagai sikap masyarakat tradisional yang dianggap masalah, dan sangat tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi (Fakih, 2009:55).

Disisi lain, modernitas membawa kesadaran awal masyarakat barat pada suatu bentuk kesadaran baru dalam melihat realitas di luar mereka. Modernitas yang oleh Rostow dianggap sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern (*Ibid*, 55-56) lebih jauh mendorong mereka untuk melakukan *stereotyping* terhadap negara lain yang kondisinya belum dan

yang diartikan sebagai penciptaan dan pemeliharaan *order* dan penyelesaian berbagai masalah bersama, tanpa harus dihadiri oleh struktur-struktur *decision making* yang mengikat (Dryzek, 2000).

Namun, pembangunan bagaikan sebuah pisau yang tajam dikedua sisinya. Masalah pembangunan, kemiskinan, dan, kesenjangan, eksistensi globalisasi ekonomi yang selama ini cenderung dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan "invisible hand" mekanisme pasar, tidak serta-merta kemudian menjadi masalah yang mudah dikelola. Karena pengelolaan persoalan ini juga menyangkut keberadaan insitusi-intitusi globalisasi seperti IMF, WorldBank, dan WTO, yang jika seandainya lembaga-lembaga itu tidak ada, akan banyak negara berkembang yang selamat dari lilitan hutang luar negeri.

Lembaga tersebut selama ini selalu berteriak untuk negara-negara berkembang, agar mengadaptasi demokrasi liberal, karena jika lalai atau tidak mematuhi, maka negara tersebut terancam tidak mendapatkan bantuan finansial untuk melaksanakan pembangunan di negaranya. Tindakan IMF, WorldBank, dan WTO yang seperti itu, dapat dikategorikan sebagai bentuk penindasan/penjajahan sosial dan ekonomi terhadap kelompok negara berkembang, dan justru sangat tidak demokratis. Menurut David Held, kondisi yang konfliktif seperti ini dapat diatasi dengan menerapkan konsep *cosmopolitan democracy* yang pada intinya merupakan pemahaman baru tentang demokrasi yang harus di-redefinisi (Held, 1995). Redefinisi demokrasi yang sifatnya lintas batas negara yang diusulkan Held, bertujuan agar isu-isu diseputar aliran kapital global, pembangunan dan beban hutang negara berkembang, dan lain-lain dapat dikendalikan pada kontrol demokrasi demi kepentingan kemanusiaan secara universal.

Persoalan Etik Dalam Pembangunan

Etika dalam pembangunan (ekonomi) kemudian menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam konteks sosial-politik di negara berkembang. Sangat penting karena pembangunan ekonomi yang dipraktekkan oleh banyak negara berkembang, ternyata menghasilkan ketimpangan yang begitu besar antara elit dengan rakyatnya, antara negara maju dengan negara berkembang, antara negara utara dan negara selatan. Artinya, pembangunan ekonomi yang dilakukan, telah dibelokkan maknanya, karena pembangunan yang terjadi pada praktiknya hanyalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi elit-elit politik yang

kurang maju (*under develop*). Pada momentum itu, dalam kerangka Bretton Woods, negara barat "mau membantu" negara yang belum dan kurang maju tersebut, melalui kebijakan liberal mereka berupa pinjaman luar negeri untuk pembangunan, dengan IMF dan World Bank sebagai alat kontrol. Namun, masalah yang kemudian muncul setelah beberapa bahkan puluhan tahun pinjaman itu diberikan untuk pembangunan negara-negara berkembang, ternyata justru menghasilkan kemiskinan, ketimpangan, bahkan kemunduran di negara-negara *underdevelop* tersebut.

Masalah ini diyakini bersumber pada model pembangunan (dengan pertumbuhan ekonominya) yang saintifik dan bebas nilai, sehingga akan selalu cenderung mengabaikan etika dalam pembangunan. Pembangunan hanya dipahami sebagai praktek-praktek pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi semata (Sen dalam Crocker, 2008:36) dan bukan dari bagaimana pembangunan itu dipahami dan dimengerti dalam konteks yang lebih sesuai. Sen (1984) berargumen bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, atau modernisasi, tetapi lebih sebagai pengembangan fungsi dan kapabilitas manusia, seperti "*what people can or cannot do, e.g., whether they can live long, escape avoidable morbidity, be as well nourished, be able to read and write and communicate, take part in literary, and, scientific pursuits, and so forth*" (Crocker, 1998:40).

Pemikiran Sen diatas, dapat dikatakan lebih merupakan sintesis dari pemikiran generasi sebelumnya sebagai pencetus wacana etik dalam pembangunan, dimana, diawal-awal tahun 1960-an Denis Goulet (yang dipengaruhi pemikiran ekonom Perancis Louis-Joseph Lebret) dan Gunnar Myrdal, berargumen bahwa pembangunan harus didefinisikan kembali (redefinisi), dimistifikasi, dan, dimasukkan ke dalam arena debat moral (*Ibid*). Namun, telah sejauh mana pembangunan di-redefinisi, di-demistifikasi, dan dimasukkan dalam *moral debates*? Karena hingga saat ini, yang nampak justru masalah pembangunan di negara berkembang telah berhasil menimbulkan masalah baru.

Pembangunan yang dilakukan oleh kebanyakan negara Asia Tenggara (dengan basis bantuan luar negeri) dapat dilihat sebagai contoh yang paling dekat dengan masalah baru yang muncul dalam diskursus pembangunan negara berkembang. Bantuan luar negeri (yang biasa dikenal dengan hutang najis) di Indonesia misalnya, telah terbukti merangsang timbulnya praktek-praktek *dictatorship* dan otoritarianisme di era Presiden Soeharto. Pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan oleh rezim berkuasa,

ternyata hanya dinikmati oleh segelintir elit politik dan kroninya, begitu pula yang terjadi pada rezim Ferdinand Marcos di Filipina. Sedemikian pentingnya pertumbuhan ekonomi, sehingga ia harus dijaga oleh elit pemimpin negara yang berlatarbelakang militer dan sangat represif untuk memastikan bahwa dengan stabilitas sosial-politik yang aman dan kondusif, bantuan hutang akan terus berdatangan demi mewujudkan *sustainable development*, sekaligus melanggengkan *poverty* dan *inequalities*.

Masalah lain yang muncul adalah kecenderungan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Peristiwa Pembantaian Dili di Timor Timur yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia pada akhir era 1990-an, dan konflik dengan kekerasan di sejumlah negara Afrika yang terjadi hingga saat ini membuktikan bahwa pembangunan tanpa etika (yang hanya dipahami dengan logika *economic growth*), sangat mengesampingkan kebebasan dan hak asasi setiap individu manusia yang ada didalamnya. Mengulangi yang dikatakan Sen (1999), "*that "development" should be viewed not in terms of economic measures (e.g. GDP growth, average annual income) but in terms of the real "freedoms" that people can enjoy such as economic facilities and social opportunities.*" Lebih lanjut Sen menjelaskan bahwa kebebasan manusia adalah tujuan utama sekaligus sebagai prinsip utama dalam pembangunan, "*economic measures are merely the means to this end*" (Terjesen, 2004).

Masalah yang juga penting adalah bagaimana pembangunan ternyata menafikan masalah gender didalamnya. Pembangunan justru telah mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan, karena tidak melibatkan analisis gender untuk suatu proses jangka panjang dalam upaya menciptakan transformasi keyakinan dan ideologi gender pada struktur kekuasaan yang adil didalamnya. Perhatian pembangunan tidak pernah menyentuh kompleksitas subordinasi perempuan didalamnya, padahal perempuan adalah sama seperti pria secara biologis. Subordinasi perempuan tidaklah bersifat biologis, namun lebih merupakan konstruksi sosial. Dua realitas itu memerlukan upaya identifikasi lebih lanjut terhadap makna "sex" sebagai perbedaan biologis, dan gender sebagai cerminan perbedaan maskulinitas dan femininitas seperti yang telah terbentuk melalui aktivitas sosial dan pendidikan (Reddock, 2000). Dalam upaya itulah, masalah subordinasi wanita dan gender kemudian lebih sering dibicarakan dalam kerangka *Women in Development (WID)* dan *Gender and Development (GAD)* pada forum-forum kritik pembangunan.

Sustainable Development Revisited

Persoalan demi persoalan yang muncul terkait dengan pembangunan, seharusnya dapat lebih jauh mendorong pemikiran tentang bagaimana idealnya merancang model pembangunan yang beretika, dan sebaiknya diawali dengan upaya untuk merangsang terbukanya konsep pembangunan itu sendiri, mengingat selama ini pembangunan diakui sebagai konsep yang samar dan kabur, juga mulai dilibatkannya masyarakat secara langsung dalam menentukan kebutuhan mereka terhadap pembangunan. Dalam konteks ini, *partisipasi* warga masyarakat dalam setiap instrumen dan proses pengambilan kebijakan (termasuk *budgeting*) adalah sangat penting, karena nantinya masyarakatlah yang kemudian mengukur pembangunan dengan kriteria-kriteria sosio-kultural mereka. Dengan kata lain, pendekatan partisipasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa mereka memiliki tidak hanya hak, tetapi juga wajib ikut dalam proses pembangunan yang sedang dilakukan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Namun, yang tidak boleh dilupakan juga adalah bahwa *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan dalam arti yang bermanfaat akan dapat diwujudkan jika, berhasil dilepaskan dari nilai-nilai saintifik yang mengikutinya. Pembangunan hendaknya harus ditinjau ulang maknanya, bahkan dengan cara-cara yang radikal agar transformasi dapat tercipta. Pembangunan juga harus diisi dengan strategi-strategi etik secara konkrit untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul, dengan menggiatkan upaya-upaya teoritis sekaligus praktis dalam upaya menggali lebih dalam jenis strategi yang diperlukan dalam pembangunan.

Referensi:

- Crocker A., David. "Development Ethics" dalam Edward Craig, ed., *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London:Routledge, 1998
- _____. *Ethics and Global Development; Agency, Capability, and Deliberative Democracy*, Cambridge University Press : Cambridge, 2008
- Berger, Peter L. *Piramida Kurban Manusia; Etika Politik dan Perubahan Sosial*, (Terjemahan) LP3ES, Jakarta, 2004
- Birdsall, Nancy. "The World is not Flat: Inequality and Injustice in Our Global Economy" dalam *WIDER Annual Lecturer 9*, UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Finland, 2006

- Dryzek, John. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestation*, Oxford University Press, 2000
- Gilpin, Robert. *Global Political Economy; Understanding The International Economic Order*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001
- Habermas, J. *The Philosophical Discourse of Modernity*. Cambridge, MA: MIT Press, 1987, dalam John Dryzek, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestation*, Oxford University Press, 2000
- Held, David, *Democracy and The Global Order*, London: Polity, 1995 dalam Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Hiariej, Eric. *Materialisme-Sejarah Kejatuhan Soeharto; Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, IREPress, Yogyakarta, 2005
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori-Teori Pembangunan dan Globalisasi* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Jackson, Robert and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press, New York, 1999
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Mas'oed, Mohtar. *Politik, Birokrasi, dan, Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
- _____. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, (Edisi II), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Reddock, Rhoda. "Why Gender? Why Development?" *International Development Research Centre*, Canada, 2000 dalam http://www.idrc.ca/en/ev-9419-201-1-DO_TOPIC.html diakses pada 14 Maret 2010 11:11PM
- Sawhney, Nitin. *Understanding Ethics in Development: Rational Reasoning and Cultural Attitudes: Planning Institutions and Processes in Developing Countries*, MIT: Cambridge, USA, 2000
- Terjesen, Siri. "Amartya Sen's Development as Freedom" dalam *Graduate Journal of Social Sciences* 1(2): London School of Economics/University of Amsterdam, 2004
- Winarno, Budi, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*, Tajidu Press, Yogyakarta, 2004
- _____. *Pertarungan Negara Vs Pasar*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2000

Diterbitkan oleh

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.**



Dr. Aldevaldiana Basudarmas (Ed. D. Rasing Center)
no. 101, Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
Telp. : (0411) 447508-459064
Fax. : (0411) 459065
E-mail: ihc-unifaj@gmail.com

ISSN 2537687-2

